

ABSTRAKSI

Pendidikan diperlakukan sebagai komoditi diperkuat sejak ditandatanganinya kesepakatan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dimana dunia secara global telah memihak kepentingan pasar. Mekanisme dan proses Globalisasi yang diperjuangkan oleh para aktor utama, Globalisasi yakni TNCs, Bank Dunia/IMF melalui kesepakatan yang dibuat di WTO (*World Trade Organization*), sesungguhnya dilandaskan pada suatu ideologi yang berangkat dari kepercayaan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dapat dicapai sebagai hasil normal dari “kompetisi bebas”.

Pemerintah harus melakukan privatisasi semua perusahaan milik negara termasuk lembaga pendidikan negara maupun semua bentuk “subsidi pendidikan” kepada rakyat harus dihentikan dan biarkan mekanisme pasar dalam sektor pendidikan yang menentukan. Anggaran pendidikan saat ini sangat memperlihatkan bahwa pemerintah memang benar-benar melepaskan tanggung jawabnya dari dunia pendidikan, apalagi memasukkan pendidikan sebagai salah satu yang diberikan tanggung jawabnya kepada pemerintah daerah. Dan pilihan tersebut telah hadir di sekitar kita PTN-PTN yang selama ini mendapatkan subsidi negara merubah status menjadi BHPMN (Badan Hukum Pendidikan Milik Negara) yang memiliki wewenang untuk mencari sumber pendapatan sendiri, akhirnya banyak bermunculan jalur-jalur pendidikan khusus dengan biaya mahal banyak bermunculan, ladang bisnis tumbuh subur di dunia pendidikan termasuk Unair sendiri telah menyatakan siap dengan membangun POM Bensin dan Restoran di sekitar jalan Jawa dan biaya pendidikan yang akan semakin naik sepuluh persen tiap tahunnya.

Pada penelitian ini permasalahan yang akan dikaji adalah: “Bagaimanakah pendidikan di Universitas Airlangga sebagai dampak dari wacana globalisasi”, dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, dimana peneliti menyajikan gambaran tentang pendidikan di Universitas Airlangga sebagai dampak dari wacana globalisasi, dari data skunder dan primer dianalisis secara kualitatif. Lokasi penelitian diambil secara *purposive* yakni Universitas Airlangga. Para informan adalah para birokrat dan staf pengajar serta mahasiswa Universitas Airlangga. Para informan ini dipilih secara *purposive*, dengan kriteria dan pertimbangan tertentu, pengumpulan data dilakukan melalui *indepth interview* dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide interview*) yang lebih menyerupai dialog bebas. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis dengan dikategorikan dan diproses melalui pemetaan (*mapping*) dan menghubungkan klasifikasi dengan referensi teori yang ada.

Dengan melihat temuan dan analisis data dapat disimpulkan dalam penelitian ini ditemukan dua wacana yang berbeda dalam menyikapi pendidikan ditengah arus globalisasi, khususnya Universitas Airlangga. Pendidikan tinggi atau Universitas Airlangga secara khusus membutuhkan ruang otonomi untuk kemandirian baik secara akademis, personal maupun finansial serta lebih kompetitif di dunia internasional, efisien dan dapat menciptakan suatu kondisi *economic base knowledge* di lingkungan akademik.

Untuk BHPMN sebagai pilihan merupakan sistem dan kebijakan yang tepat bagi Universitas Airlangga pada situasi global ditengah raksasa pasar dunia yang luar biasa besarnya, di dalam raksasa ini terdapat globalisasi pendidikan, *raising demand* dan *academic capitalism*. Para pendidik di Unair meyakini bahwa

majunya pendidikan satu-satunya bukan pada subsidi pendidikan, tetapi otonomi yang harus direbut serta mendorong semua unit yang ada menjadi unit finansial karena faktanya membutuhkan dana besar untuk otonomi pendidikan.

Wacana tandingan yang muncul dari kelompok mahasiswa juga muncul dalam temuan penelitian ini, privatisasi pendidikan yang diwakili oleh mahasiswa yang duduk di organisasi intra dan ekstra kampus Universitas Airlangga, privatisasi pendidikan merupakan konspirasi global yang dikenal dengan globalisasi yang membonceng kepentingan para pelaku kapital global dengan mencoba membuka pasar seluas-luasnya dan menanamkan modal tanpa ada rintangan oleh birokrasi negara, sehingga negara tidak perlu repot-repot mensubsidi rakyatnya dan diserahkan ke swasta dengan menjualnya atau memberikan ruang ke swasta untuk mengembangkan modal termasuk ke institusi pendidikan melalui privatisasi pendidikan, tetapi yang terjadi adalah pemerintah kita terlalu loyal dan setia dengan IMF, World Bank dan institusi kapital global untuk mengemis hutang dan membayar bunga hutang begitu besarnya, bagi mereka seharusnya pendidikan murah, terjangkau dan difasilitasi sudah selayaknya menjadi tanggung jawab negara, karena pendidikan dalam UUD sekurang-kurangnya harus disubsidi 20% dari total APBN dan berdasarkan peraturan daerah no.25 tahun 1999 dan no.32 tahun 2004 sekurang-kurangnya juga disubsidi sebesar 20 % dari total APBD. Selain itu jika terdapat *political will* dari pemerintah untuk menangkap dan menyita harta para koruptor dan dari dana sitaan tersebut dialokasikan ke sektor pendidikan mereka pendidikan untuk rakyat kita bisa gratis sampai tingkat S3.

